

LAPORAN KINERJA

2021

LPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN



Workshop Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Lintas Timur Km. 36 Indralaya Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan

www.lpmpsumsel.kemdikbud.go.id

PENGANTAR

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan

Assalamuálaikum Wr. Wb.



Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2020, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan kinerja ini juga digunakan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan strategi kedepannya.

Sebagai *supporting unit*, LPMP Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan koordinasi pengelolaan kinerja dan keuangan LPMP Provinsi Sumatera Selatan. Diperlukan peran serta dari *stakeholder* dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis kegiatan yang telah ditetapkan LPMP Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan kinerja ini kami sadari belum disajikan secara sempurna dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya dapat memberi gambaran tentang hasil pelaksanaan pencapaian kinerja yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2020. Kedepannya, LPMP Provinsi Sumatera Selatan akan terus berupaya untuk lebih menyempurnakan laporan kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas implementasi penjaminan mutu pendidikan dan *good governance* di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Selatan. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Wassalamuálaikum Wr.Wb.



Indralaya, Januari 2021

Kepala,

Drs. Suyato, M.AP.

NIP 196411011998031001

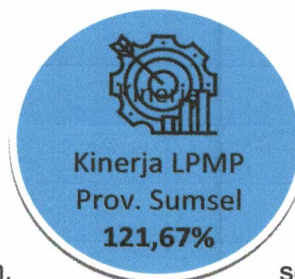
RINGKASAN EKSEKUTIF

LPMP Provinsi Sumatera Selatan baru menyusun Rencana Strategis 2020 - 2024 yang di dalamnya telah disepakati berbagai sasaran kegiatan yang akan diimplementasikan. Berdasarkan data yang ada, pada rentang 2015 - 2019, kinerja memiliki tren yang terus meningkat, sementara serapan anggaran LPMP memiliki tren yang kurang lebih sama, fluktuatif.

Pada tahun 2020 LPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki sasaran kegiatan "*Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan,*" yang terdiri atas 3 (tiga) indikator keberhasilan kinerja kegiatan yang dijadikan Perjanjian Kinerja antara Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdikbud sebagai berikut:

Kode	Sasaran kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK, IKK)	Target
SK 1	<i>Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan</i>	
IKK1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	26,5
IKK2	Persentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
IKK3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95

Capaian kinerja LPMP pada tahun 2020 sebesar LPMP sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kondisi internal LPMP Provinsi Sumatera Selatan keterbatasan kewenangan,



Provinsi Sumatera Selatan 121,67%. Kondisi kinerja berbagai faktor internal dan yang mempengaruhi kinerja tahun 2020 adalah sementara kondisi eksternal yang

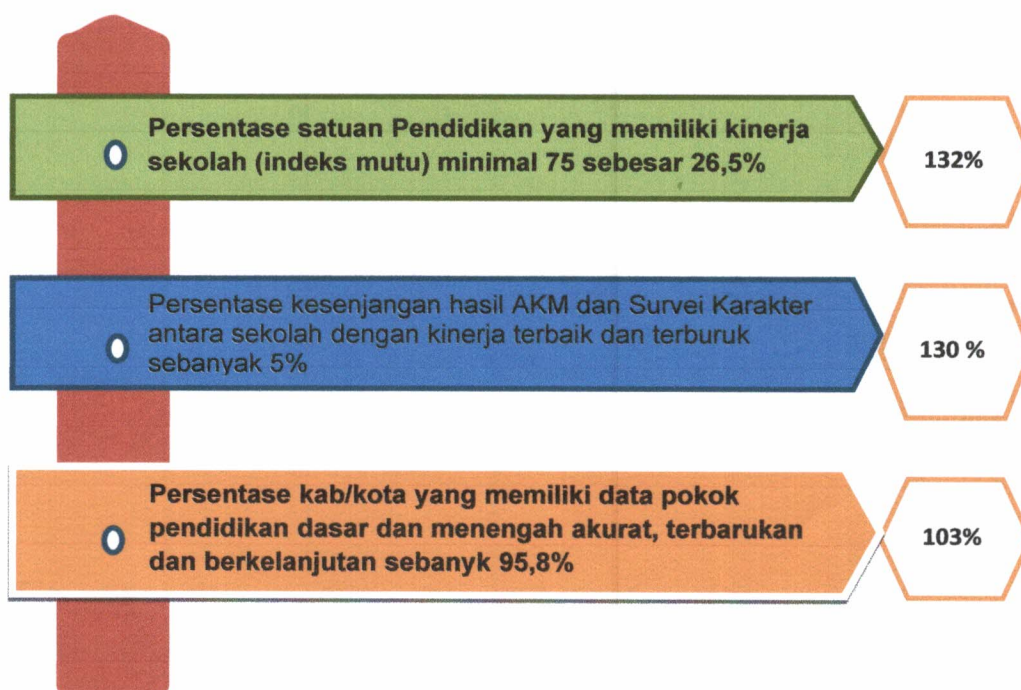
Laporan Kinerja | Tahun 2021

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

mempengaruhi kinerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah kondisi pandemi covid-19, belum terlaksananya program nasional “Asesmen Nasional” yang terdiri atas Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survey Karakter, dan Survey Lingkungan Belajar. Hasil

dari Asesmen Nasional sebagai sumber data penghitungan salah indikator sasaran kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2020 pelaksanaan program Asesmen Nasional masih dalam kategori persiapan, berupa sosialisasi.

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 menyajikan hasil/capaian kinerja pada tahun 2020 yang terdiri 3 (tiga) indikator keberhasilan kinerja sasaran.



Rata-rata capaian indikator kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 sebesar 121,67%. Pencapaian indikator kinerja di LPMP Provinsi Sumatera Selatan memberikan gambaran keberhasilan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan. Komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari *stakeholder* LPMP Provinsi Sumatera Selatan sangat mempengaruhi keberhasilan program-program di LPMP Provinsi Sumatera Selatan. Terkait dengan penggunaan anggaran LPMP, dari total pagu Rp. Rp. 28.997.711.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 26.084.208.584 atau 89,95%.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Juknis dan juklak program dari pusat yang menjadi acuan terlambat dan belum terperinci
2. Aplikasi pengumpulan data mutu belum optimal dan masih dalam tahap pengembangan sehingga ketersediaan sumber data hasil terlambat
3. Komitmen dan kompetensi pelaksana pendidikan di daerah terhadap program penjaminan mutu pendidikan belum optimal dan beragam.
4. Rasio pengawas dengan sekolah binaan di beberapa kabupaten/kota tidak sesuai
5. Kondisi geografis daerah kabupaten/kota yang beragam
6. Kompetensi dan komitmen sumber daya manusia pegawai LPMP belum optimal
7. Belum tersedia dukungan regulasi penguat kebijakan pusat kepada stakeholder

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan PMP dilaksanakan menggunakan juknis dan juklak yang dikembangkan secara mandiri
2. Menindaklanjuti hasil pengumpulan data yang sudah tersedia tanpa menunggu data terkumpul semua
3. Melibatkan unsur dinas pendidikan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan serta melaksanakan pendampingan secara intens kepada pengawas sekolah
4. Mengusulkan kepada pihak berwenang untuk pengangkatan pengawas baru untuk melengkapi jumlah yang sudah ada
5. Mengusulkan penyesuaian anggaran antar daerah untuk mengantisipasi kondisi geografis kabupaten/kota
6. Meningkatkan komitmen dan kompetensi pegawai melalui Capacity Building, studi tiru dan magang
7. Mengusulkan regulasi untuk memperkuat implementasi program PMP

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR/FIGURE.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORANISASI.....	4
D. PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN.....	7
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN.....	8
C. PERJANJIAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. CAPAIAN KINERJA.....	11
B. CAPAIAN ANGGARAN.....	16
BAB IV PENUTUP.....	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	20

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Pemenuhan SNP Tahun 2020.....	2
Table 2 Rasio Jumlah Pengawas Sekolah Per Kab./Kota.....	6
Table 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja LPMP Prov. Sumatera Selatan.....	9
Table 4 Ringkasan Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan.....	10
Table 5 Klasifikasi Sekolah Menurut Indeks Mutu Sekolah.....	13
Table 6 Rancangan Jadwal Pelaksanaan Asesmen Nasional.....	7
Table 7 Realisasi Kinerja Fisik dan Anggaran.....	16

DAFTAR GAMBAR (FIGURE)

Figure 1 Kinerja Pemenuhan SNP Tahun 2016-2019 di Sumatera Selatan.....	2
Figure 2 Struktur Organisasi LPMP Provinsi Sumatera Selatan.....	5
Figure 3 Tujuan dan Indikator Tujuan.....	7
Figure 4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	9
Figure 5 Jumlah Sekolah Berdasarkan Indeks Mutu.....	13
Figure 6 Persentase Kab./Kota yang memiliki Dapodikdasmen Akurat, terbarukan dan berkelanjutan.....	15

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan Nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa “LPMP adalah UPT Kemdikbud yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai SNP.”

Pada periode tahun 2015 - 2019 LPMP Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan dalam bentuk pemetaan mutu dan supervisi, fasilitasi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Sampai dengan tahun 2019 capaian sasaran penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- Jumlah satuan pendidikan yang dipetakan mutu pendidikannya sebanyak 6.074 sekolah dari 6.948 sekolah;
- Jumlah satuan pendidikan yang disupervisi mutu pendidikannya sebanyak 3.399 sekolah dari 6.948 sekolah;
- Jumlah satuan pendidikan difasilitasi peningkatan mutunya sebanyak 2.688 sekolah dari 6.948 sekolah

Selanjutnya, kinerja pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) satuan pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada Grafik 1 dan jumlah satuan pendidikan berdasarkan pemenuhan SNP pada Tabel 1.

Table 1 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Pemenuhan SNP Tahun 2020

Kategori	Skor Pemenuhan		SD		SMP		SMA		SMK	
	Batas Atas	Batas Bawah	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Menuju SNP 1	0	2,04	3	0,07%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Menuju SNP 2	2,05	3,7	8	0,19%	2	0,17%	0	0,00%	1	0,38%
Menuju SNP 3	3,71	5,06	9	0,22%	1	0,08%	1	0,20%	1	0,38%
Menuju SNP 4	5,07	6,66	3.734	90,46%	948	79,40%	356	72,65%	239	91,22%
SNP	6,67	7	374	9,06%	243	20,35%	133	27,14%	21	8,02%
Jumlah			4.128		1.194		490		262	

Berdasarkan Tabel 1 tersebut mayoritas semua jenjang satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 baru memenuhi kategori Menuju SNP 4. Berdasarkan Grafik 1 dapat dilihat bahwa kinerja pemenuhan SNP satuan pendidikan Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari Tahun 2016 dengan rata-rata pemenuhan kategori Menuju SNP 3 menjadi Menuju SNP 4 di tahun 2019.

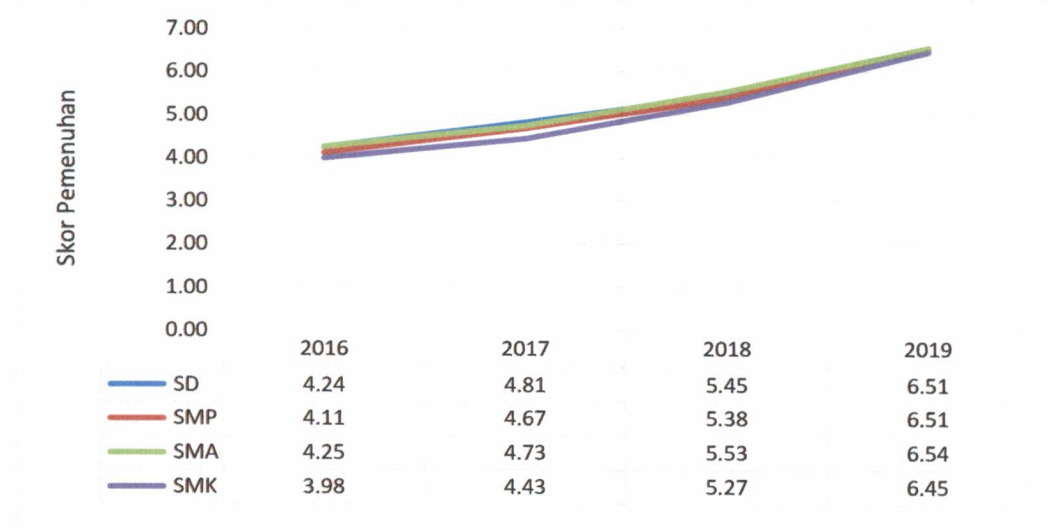


Figure 1 Kinerja Pemenuhan SNP Tahun 2016-2019 di Sumatera Selatan

Sehubungan dengan kinerja pemenuhan SNP dan jumlah satuan pendidikan yang baru memenuhi rata-rata pada kategori Menuju SNP 4 maka LPMP Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen menuntaskan target sasaran kegiatan penjaminan mutu pendidikan pada seluruh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah periode Tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan semua satuan pendidikan semua jenjang memenuhi standar minimal yaitu kategori

SNP guna mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya dalam melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan, beberapa isu yang menjadi isu strategis dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan antara lain:

- Penyebaran covid-19 secara global menyebabkan perubahan besar dalam sistem penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam penjaminan mutu pendidikan.
- Implementasi berbagai perubahan regulasi dalam Pendidikan
- Akurasi, kelengkapan dan updating data mutu Pendidikan
- Pengembangan dan Implementasi Aplikasi pada Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan dan Supervisi Mutu Pendidikan.
- Budaya mutu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- Komitmen pengelola satuan pendidikan melakukan penjaminan mutu.
- Keselarasan regulasi pemerintah daerah terhadap regulasi pemerintah dalam bidang pendidikan.
- Perubahan era revolusi industri.

Isu-isu tersebut di atas harus segera ditindaklanjuti dengan program-program yang tepat sehingga LPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan dapat mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan didukung oleh teknologi.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan laporan kinerja adalah:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi LAKIP;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang SAKIP;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMP Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan Pendidikan menengah;
- b. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;

- d. pengembangan model penjaminan mutu Pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi

Adapun struktur organisasi LPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

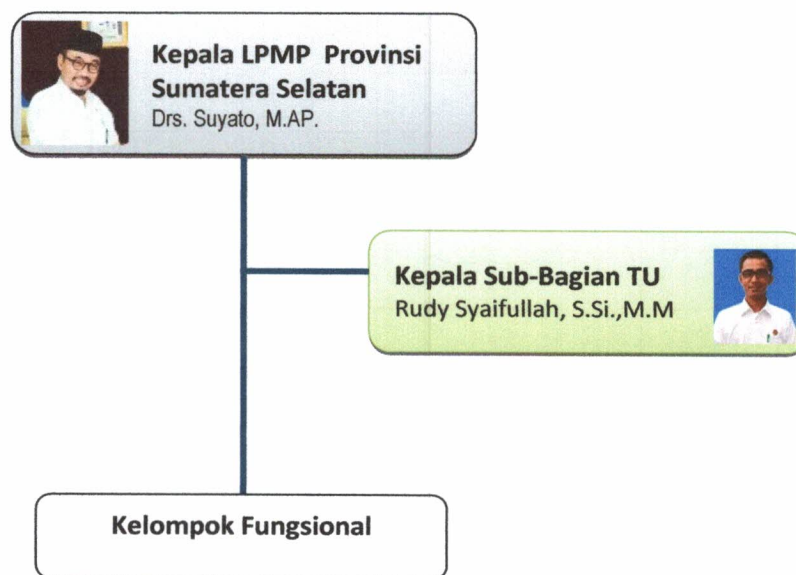


Figure 2 Struktur Organisasi LPMP Provinsi Sumatera Selatan

D. PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi diatas, maka LPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki banyak tantangan dan isu strategis. Tantangan LPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu sekolah mencapai SNP antara lain:

- ❖ Jumlah sekolah yang mencapai SNP di Sumatera Selatan sangat terbatas. Berdasarkan data PMP Dapodik Tahun 2019, jumlah sekolah dengan kategori:
 - menuju SNP 1 sebanyak 3 sekolah,
 - menuju SNP 2 sebanyak 11 sekolah
 - menuju SNP 3 sebanyak 12 sekolah

Laporan Kinerja | Tahun 2021

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

- menuju SNP 4 sebanyak 5.277 sekolah
- SNP sebanyak 771 sekolah
- ❖ Jumlah pengawas satuan pendidikan relatif sedikit. (R
- ❖ Rasio pengawas terhadap sekolah binaan tidak sesuai dengan regulasi untuk beberapa kabupaten/kota.

Table 2 Rasio Jumlah Pengawas Sekolah Per Kab./Kota

No.	Kab./Kota	SD			SMP			SMA/SMK		
		Pengawas	Sekolah	Rasio	Pengawas	Sekolah	Rasio	Pengawas	Sekolah	Rasio
1	Pagaralam	4	87	22	4	22	6	4	15	4
2	Musi Banyuasin	42	479	11	10	158	16	4	86	22
3	Ogan Ilir	22	266	12	9	81	9	4	48	12
4	Prabumulih	10	99	10	3	23	8	5	26	5
5	OKU	18	202	11	12	65	5	17	41	2
6	OKUS	17	279	16	5	70	14	7	34	5
7	Lubuk Linggau	7	105	15	9	36	4	12	34	3
8	Lahat	26	301	12	7	75	11	7	51	7
9	OKI	49	467	10	16	137	9	9	70	8
10	Palembang	26	380	15	32	207	6	42	196	5
11	Muara Enim	43	377	9	7	105	15	4	48	12
12	Musi Rawas	26	317	12	16	70	4	11	37	3
13	Pali	8	127	16	4	47	12	7	35	5
14	Empat Lawang	6	185	31	6	38	6	5	19	4
15	Banyuasin	50	507	10	22	123	6	8	78	10
16	Muratara	11	127	12	4	34	9	1	14	14
17	OKU Timur	32	407	13	9	88	10	4	74	19
	Jumlah	397	4712		175	1379		151	906	

- ❖ Masih banyak sekolah yang fasilitas sarana dan prasarana sekolah belum lengkap
- ❖ Masih banyak sekolah yang belum memahami dan menerapkan SPMI
- ❖ Sebagian besar pemerintah belum mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap sekolah menjalankan siklus sistem penjaminan mutu internal (SPMI).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Perumusan tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan dua tujuan indikator kinerja tujuan.

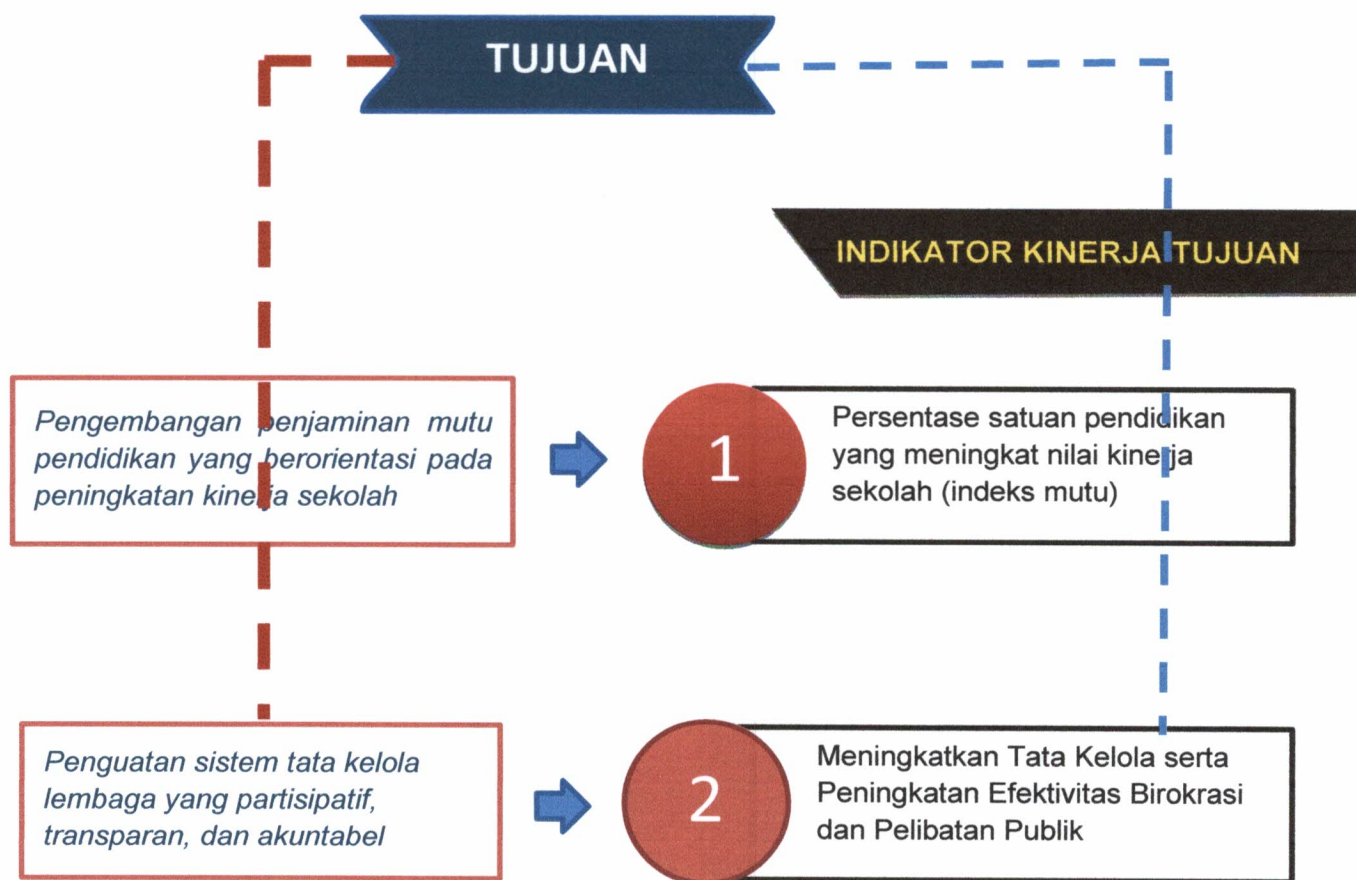


Figure 3 Tujuan dan Indikator Tujuan

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran Kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Selatan periode 2020 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan;
2. Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Selatan.

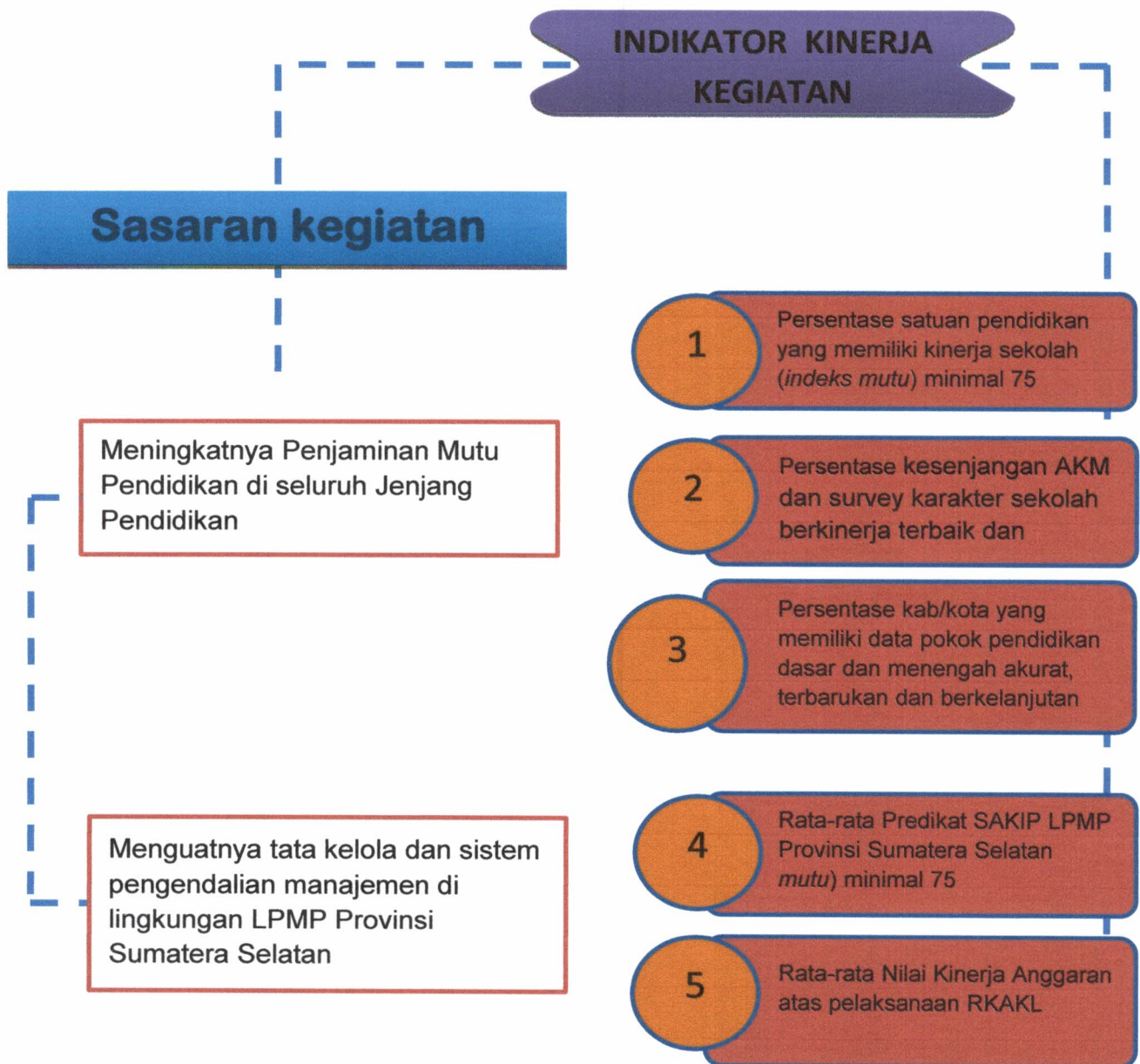


Figure 4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) LPMP Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Table 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja LPMP Prov. Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Keberhasilan Kinerja	Target (dalam %)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kinerja sekolah (<i>indeks mutu</i>) minimal 75	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
	Persentase kesenjangan AKM dan survey karakter sekolah berkinerja terbaik dan terburuk	5	5	5	5	5
	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95	95,2	95,4	95,6	95,8
2. Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Selatan	Rata-rata Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Selatan	BB	A	A	A	A
	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL	81	81	82	83	84

C. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan sasaran kegiatan indikator keberhasilan kinerja, pada awal tahun anggaran 2020 Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud. Adapun substansi Perjanjian kinerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Table 4 Ringkasan Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,50
		1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00
		1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,00

Di dalam mewujudkan kegiatan perjanjian kinerja tersebut LPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki anggaran sebesar Rp 28.997.711.000,- (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Selanjutnya berdasarkan surat perjanjian kinerja antara Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan dan Dirjen PAUD Dikdas Dikmen, maka kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai dan menginstruksikan kepada seluruh pegawai LPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat perjanjian kinerja individu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban LPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai sasaran (kinerja) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan dilakukan dalam upaya memberikan kontribusi memenuhi visi Presiden Republik Indonesia dalam penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu *“Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global”*.



A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, sasaran kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Selatan yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan,” yang terdiri atas 3 (tiga) indikator keberhasilan kinerja kegiatan untuk dicapai, yaitu 1) Persentase satuan pendidikan (SD, SMP, SMA) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75, 2) persentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk sebesar 5%, dan 3) persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan sebesar 95%. Pengukuran capaian indikator kinerja mengacu pada rumus yang terdapat pada laman e-SAKIP BPKP (http://app.bpkp.go.id:9090/esakip/pengukuran/rumus_capaian), yaitu jenis *maximize* dan *minimize*. Rumus *maximize* digunakan untuk menghitung capaian IKK 1 dan IKK 3

sedangkan rumus *minimize* digunakan untuk menghitung capaian IKK 2. Berikut rumus penghitungan capaian indikator kinerja jenis *maximize* dan *minimize*:

Maximize	Minimize
Semakin tinggi semakin baik $\frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$	Semakin rendah semakin baik $\frac{ \text{Rencana} - \text{Realisasi} - \text{Rencana} \times 100\%}{\text{Rencana}}$

Tingkat ketercapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan

Penjaminan mutu Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan.

Peningkatan/perbaikan tersebut ditunjukkan dengan peningkatan capaian pemenuhan SNP



IKK 1 Persentase satuan pendidikan (SD, SMP, SMA) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75"

Target 2020 = 26,5%

Realisasi 2020 = 35%

Capaian 2020 = 132,07%

Target Akhir

Renstra 2024 = 29,2%

% Capaian awal

renstra 2020 = 132,07%

Angka sebesar 35% diukur dengan memperhitungkan data capaian pemenuhan SNP pada aplikasi Dapodik PMP yang dikonversi dengan rentang 0 – 100.

Table 5 Klasifikasi Sekolah Menurut Indeks Mutu Sekolah

Rentang Pemenuhan SNP	Kategori Pemenuhan SNP	Rentang Pemenuhan Kinerja Sekolah	Kategori Pemenuhan Kinerja Sekolah	Rentang Indeks Mutu	Kategori Indeks Mutu
0 – 2,04	Menuju SNP 1	0 – 6,58	Belum baik	0 - 74	Berkinerja Buruk
2,05 – 3,70	Menuju SNP 2				
3,71 – 5,06	Menuju SNP 3				
5,07 – 6,66	Menuju SNP 4				
6,67 – 7,00	SNP	6,59–7,00	Baik	75 - 100	Berkinerja Baik

Berdasarkan Tabel 1, dapat dihitung bahwa indeks mutu sekolah minimal 75 mempunyai konversi skor pemenuhan SNP minimal 6,59, sehingga dapat diketahui jumlah dan persentase sekolah dengan indeks mutu minimal 75.

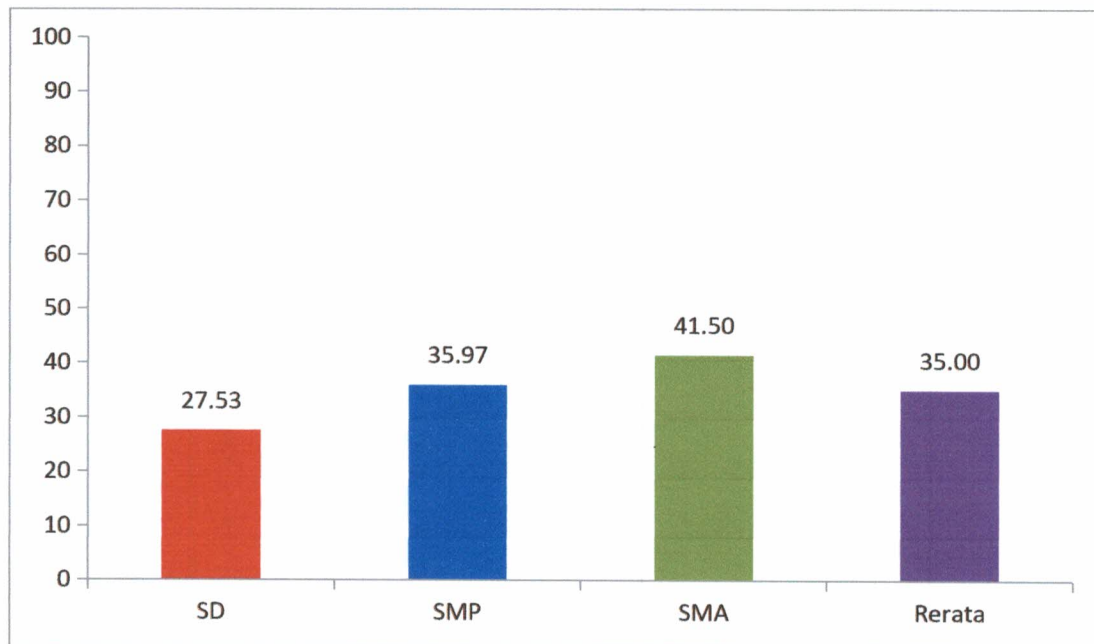


Figure 5 Persentase Jumlah Sekolah Berdasarkan Indeks Mutu Minimal 75

Capaian kinerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 pada indikator “*Persentase satuan pendidikan (SD, SMP, SMA) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75*” sebesar 35%. Capaian tersebut melebihi target persentase yang ditetapkan sebesar 26,5%, artinya terdapat keberhasilan capaian sebesar 132,07%.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor yaitu: (1) program/kegiatan supervise mutu pendidikan dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Sumatera Selatan terhadap sekolah binaan dan juga sekolah imbas; 2) peran aktif pengawas sekolah dalam melaksanakan pendampingan kepada sekolah binaannya dalam hal pengisian data PMP dan supervisi mutu satuan pendidikan; 3) kualitas isian data mutu satuan pendidikan meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya; (4) meningkatnya komitmen satuan pendidikan untuk memenuhi SNP; dan (5) data mutu satuan pendidikan (rapor mutu) sudah dijadikan *baseline* penyusunan program kerja dan kegiatan oleh satuan pendidikan.



IKK 2. Persentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.

Target capaian kinerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan terkait “*Persentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja*

terburuk sebesar 5%” telah tercapai. Capaian IKK 2 ini diperoleh dari data rapor mutu satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 dengan indikator yang berhubungan. Dari data rapor mutu, ditentukan batas bawah dan batas atas untuk menentukan sekolah berkinerja buruk (6,133) dan sekolah berkinerja baik (6,756). Kemudian diperoleh data jumlah sekolah pada rentang batas bawah dan batas atas sebanyak 206 sekolah dari 5.665 sekolah. Sehingga ditentukan persentase kesenjangannya adalah 3,5%. Kemudian untuk menentukan persentase capaian kinerja IKK 2 LPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 digunakan rumus *minimize* dan diperoleh data persentase capaian indikator kinerja sebesar 130%. Capaian indikator kinerja tersebut melebihi target kinerja yang sudah ditentukan.

Target (<i>Minimized</i>) IKK.2 Th. 2020	= 5%
Realisasi IKK 2 Th. 2020	= 3,51%
% Capaian Kinerja Th. 2020	= 130%

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target IKK 2 tersebut adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan.



IKK 3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan sebesar 95%”

Target 2020	= 95%
Realisasi 2020	= 98,52%
Capaian 2020	= 103%

Target Akhir
Renstra 2024 = 95,6%
% Capaian awal
renstra 2020 = 103%

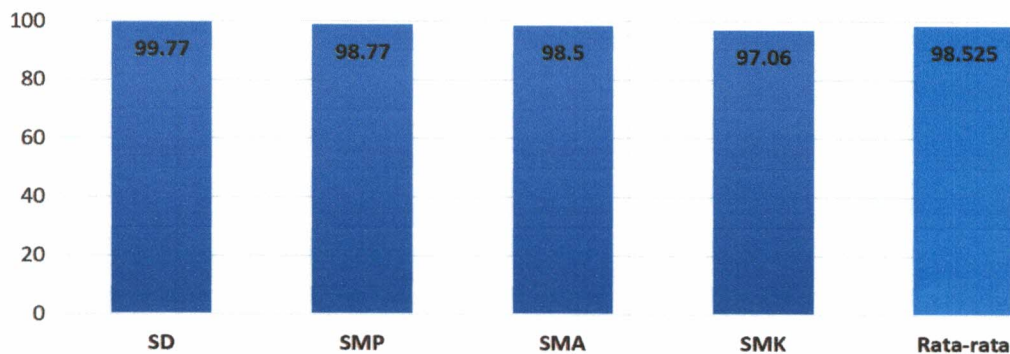


Figure 6 Persentase Kab./Kota yang memiliki Dapodikdasmen Akurat, terbaru dan berkelanjutan

Berdasarkan realisasi target data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan seperti ditunjukkan pada **Figure 6** maka dapat disimpulkan realisasi ketercapaian data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan pada tahun 2020 sebesar 103,71%. Dibandingkan target akhir renstra tahun 2024, ternyata realisasi persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan sudah bisa melampaui target akhir renstra LPMP Provinsis Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian tersebut yaitu:

1. Koordinasi yang baik antara pengelola dapodik pusat, LPMP Provinsi Sumatera Selatan, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
2. Aplikasi dapodik yang mudah di mudah di akses
3. Kesadaran sekolah akan pentingnya data dapodik yang akurat dan terbaru sebagai database pembayaran tunjangan kinerja guru, bantuan operasional sekolah, bantuan lainnya, serta sumber data peningkatan mutu satuan pendidikan.



B. CAPAIAN ANGGARAN

Pagu anggaran LPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp 58.101.101.876.000 Namun karena kondisi pandemic covid-19, maka terjadi pemotongan anggaran LPMP Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 tahap masing-masing sebesar Rp. 26.512.237.000 (tahap 1), sebesar Rp. 1.125.000.000 (tahap 2), sebesar Rp. 1.125.000.000 (tahap 3), dan sebesar Rp. 973.353.000 (tahap 4), sehingga anggaran LPMP Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 28.997.711.000. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan pada seluruh jenjang Pendidikan” dengan 3 (tiga) indikator kinerjanya yang terdistribusi ke tujuh output (lihat grafik).

LPMP Provinsi Sumatera Selatan	Pagu 2020	Realisasi 2020	
	28.997.711.000	Rp. 26.084.208.584	89,95%

Table 6 Realisasi Kinerja Fisik dan Anggaran

Kode	Nama Output	Kinerja Fisik			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
5630.001	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu	6.880	6.074	88,24	Rp. 304.600.000	Rp. 214.744.000	70,5

Laporan Kinerja | Tahun 2021

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Nama Output	Kinerja Fisik			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
	pendidikannya						
5630.002	Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	6.880	6.907	100,39	Rp. 1.848.840.000	Rp. 1.510.221.180	81,68
5630.003	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	340	2.040	600	RP. 2.802.300.000	Rp. 2.296.496.999	81,95
5630.004	Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	6.880	6.574	95,55	Rp. 1.362.200.000	Rp. 846.126.900	62,11
5630.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	100	Rp. 170.475.000	Rp. 167.693.000	97,98
5630.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	100	Rp. 3.043.165.000	Rp. 2.540.493.785	83,48
5630.994	Layanan Perkantoran	1	1	100	Rp. 19.466.131.000	Rp. 18.509.090.720	95,08
TOTAL					Rp. 28.997.711.000	Rp. 26.084.208.584	89,95

Efisiensi anggaran

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, seluruh kementerian/lembaga diharapkan melakukan penghematan penggunaan anggaran khususnya belanja barang. Pada tahun 2020, ada sisa anggaran sebesar 10.05% atau Rp 2.913.502.416 yang tidak digunakan.

Anggaran tersebut merupakan anggaran hasil efisiensi yang dilakukan di tahun 2020 dan tidak dapat dioptimalisasikan kembali disebabkan terbatasnya waktu. Sumber penghematan anggaran terutama berasal dari efisiensi belanja barang meliputi pengembalian belanja, perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non-operasional lainnya.

BAB IV PENUTUP

Sebagai satker yang memberikan dukungan kepada unit utama Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, pada tahun 2020 LPMP Provinsi Sumatera Selatan telah berkontribusi mendukung capaian sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah “*Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan*” sebesar 102,57%, sedangkan capaian kinerja anggaran sebesar 97,85 %. Sehubungan dengan itu, LPMP Provinsi Sumatera Selatan dituntut selalu mampu meningkatkan kinerjanya dan terus berupaya menjadi yang terdepan dan menjadi contoh teladan bagi unit organisasi lainnya.

LPMP Provinsi Sumatera Selatan senantiasa melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Kemdikbud dan Pemerintah Daerah. Beberapa rencana ke depan yang perlu dirumuskan di tahun 2021 ini antara lain adalah:

- ❖ Melakukan evaluasi kinerja dan kompetensi pegawai secara intensif;
- ❖ Meningkatkan kualitas kerja pegawai melalui internalisasi nilai-nilai penjaminan mutu pendidikan (Integritas, Profesional, Akuntabel, Peduli dan Inovatif) dan slogan layanan yaitu LPMP Sumsel melayani dengan **HATI** (**H**umanis, **A**manah, **T**anpa Pamrih, dan **I**ntegritas);
- ❖ Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran lembaga, dengan dukungan database dan penggunaan sistem informasi yang memadai secara berkala;
- ❖ Mereviu proses bisnis internal, SOP, dan standard layanan secara periodik sebagai upaya untuk meningkatkan mutu kinerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan.
- ❖ Melakukan reviu Rencana Strategis LPMP Provinsi Sumatera Selatan secara berkala;
- ❖ Mensosialisasikan Perjanjian Kinerja antara Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan dan Dirjen PAUD Dikdas Dikmen Kemdikbud kepada seluruh pegawai LPMP Provinsi Sumatera Selatan dan menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk Menyusun perjanjian kinerja individu.

Laporan Kinerja | Tahun 2021

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020		REALISASI TAHUN 2020			
		TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	%
<i>Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan</i>	1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu)	26,5%	4.469.100.000	35%	132,07%	3.357.367.899	75,12
	2. Persentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5%	1.848.840.000	3,5%	130%	1.510.221.180	81,68
	3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95%	22.679.771.000	98,52	103%	21.216.619.505	93,55

LAMPIRAN 2. PERNYATAAN REVIU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2019 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Inderalaya, Januari 2021
Ketua SPI LPMP Provinsi Sumatera Selatan,



Sugianto, S.Pd., MM
NIP 197105202001121003

Laporan Kinerja | Tahun 2021

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

CHECKLIST REVIU LAPORAN KINERJA

LELBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

No.	Aspek Reviu	Unsur yang direviu	Status	
			Ya	Tidak
I	FORMAT			
a	Laporan kinerja (KJ) telah menampilkan data penting instansi pemerintah	Dasar hukum	✓	
		Tugas dan fungsi	✓	
		Visi dan misi	✓	
		Permasalahan strategis	✓	
		Langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan	✓	
		Hasil yang sudah dicapai	✓	
		Anggaran yang digunakan dalam kurun waktu tertentu	✓	
b	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK)	✓	
		Rencana kinerja tahunan	✓	
		Sasaran kegiatan	✓	
		Perjanjian kinerja	✓	
		Target kinerja		
c	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	Kelengkapan penyajian seluruh indikator kinerja	✓	
		Kelengkapan penyajian target-target kinerja	✓	
		Kelengkapan penyajian target keuangan	✓	
		Kelengkapan realisasi terget-target kinerja dan keuangan	✓	
		Analisis capaian kinerja	✓	
d	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Kelengkapan lampiran sesuai isi laporan	✓	
		Ketepatan lampiran sesuai isi laporan	✓	
e	Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	Menyajikan rekomendasi perbaikan	✓	
		Ketepatan rekomendasi	✓	
f	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Menyajikan informasi keuangan	✓	
		Informasi keuangan sesuai dengan capaian kinerja	✓	
		Realisasi anggaran	✓	
		Menyajikan analisis akuntabilitas keuangan	✓	
II	MEKANISME PENYUSUNAN			
a	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	LKj telah disusun dengan data yang memadai	✓	
b	Telah terdapat	Terdapat sistem pengumpulan data	✓	

Laporan Kinerja | Tahun 2021

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Aspek Reviu	Unsur yang direviu	Status	
			Ya	Tidak
	mekanisme penyampaian data dan informasi dair unit ke unit penyusun LKj	Terdapat sistem monitoring dan pengumpulan data	✓	
		Sistem pengumpulan data berjalan dengan baik	✓	
C	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit	Terdapat penanggungjawab pengumpulan data dan informasi di tiap unit	✓	
d	Data/informasi kinerja yang disampaikan LKj telah diyakini keandalannya	Data yang digunakan relevan	✓	
		Data yang digunakan dari sumber yang sesuai	✓	
		Data yang digunakan terkini	✓	
		Data yang digunakan tepat satuan ukuran	✓	
e	Analisis dalam LKj telah diketahui oleh unit terkait	Analisis/penjelasan dalam LKj sudah dibahas secara internal	✓	
		Analisis sudah disetujui oleh pimpinan unit kerja	✓	
III	SUBSTANSI			
a.	Tujuan/sasaran LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran PK dan selaras dengan renstra	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK	✓	
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan renstra	✓	
		Jika Tujuan/sasaran dalam LKj tidak selaras dengan PK dan Renstra, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan Tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓	
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran IKK	✓	
		Jika Tujuan/sasaran dalam LKj tidak selaras dengan Indikator Kinerja dan IKK, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓	
		IKK dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓	
		Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		Indikator Kinerja (IK) telah SMART	✓	
		PERSENTASE YA	100	